KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Perdamaian Israel-Palestina, Fadli Ajak Negara OKI Tolak Proposal Trump
Tanggal : Minggu, 02 Februari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Perdamaian Israel-Palestina

Fadli Ajak Negara OKI Tolak Proposal Trump

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengecam proposal Presiden AS Donald Trump terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel. Proposal ini dinilai menjustifikasi penjajahan Israel dan merusak masa depan pembentukan negara Palestina.

FADLI bilang, sangat jelas, negara di dunia melakukan proposal Trump meneguhkan penolakan terhadap proposal pendudukan Israel atas wilayah tersebut, khususnya negara-Palestina. "Proposal itu juga menegaskan keberpihakan Trump negara OKI.

kepada Israel sangat telanjang, "Sebagai negara dengan menabrak hukum dan norma-konstitusi yang menolak dan norma internasional. Terutama memerangi penjajahan, kita Resolusi Dewan Keamanan wajib melawan proposal AS PBB nomor 2334 yang men-itu. Proposal itu ilegal dan ugal-desak Israel menghentikan ugalan. Posisi kita di Konferensi pembangunan permukiman di PUIC mendesak negara-negara tanah Palestina yang diduduki," Muslim dan dunia menekan tegas Fadli di sela Konferensi Israel secara politik, ekonomi, Parlemen Negara-Negara OKI di sosial dan budaya agar tunduk Ouagadougou, ibu kota Burkina kepada hukum dan norma inter-Faso, kemarin. nasional," urai dia.

Anggota Komisi I DPR itu menilai, proposal Trump soal Palestina tak boleh sekadar dikecam. Ia mendorong negara-berdasarkan wilayah pra-1967. Karenanya, mengakui proposal deal of century usulan Trump adalah sebuah kekeliruan.

Pada sisi lain, sambung dia, proposal Trump juga merusak masa depan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan ibu kota Yerusalem dan

"Proposal itu melabrak 'garis merah' hak-hak mendasar bangsa Palestina, terutama hak legal mereka hidup di Tepi Barat yang dicaplok Israel. Selain itu, hak atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi negara Palestina," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, persoalan Palestina menjadi sorotan, bahkan isu utama di PUIC. Seperti sebelumnya, Konferensi Parlemen Negara-negara OKI di Burkina Faso juga mendapatkan perhatian penuh dari semua delegasi.

"Peran DPR terkait Palestina sangat diakui PUIC. Jangan lupa, DPR mengusulkan, kemudian diadopsi pembentukan Komisi Palestina di PUIC saat Konferensi PUIC ke-7 di Palembang tahun 2012 lalu," tandasnya. ■ ONI